

---

# PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Bahrujianor<sup>1</sup>, Mutmainah<sup>2</sup>, Leliana Maria Angela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

---

## Article Info

### Article history:

Received November, 13<sup>th</sup> 2021

Revised December, 5<sup>th</sup>, 2021

Accepted December, 20<sup>th</sup> 2021

### Keywords:

*Environmental control, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring, planning, implementation*

---

## ABSTRACT

*The purpose in this research is to test the influence of government internal control system to the planning and implementation of Village Fund budget in Mentaya Hulu Sub-district, East Kotawarwants Regency both partially and simultaneously. The research method used to analyse this research is quantitative with a descriptive format that aims to describe, summarize the various conditions, situations or various variables present in the village apparatus. The population in this research is the entire village and sub-district apparatus consisting of 16 villages 1 village and 1 sub district with research samples as much as 189 respondents. the control environment significantly affects the implementation of village funds budget. Risk assessment is a significant impact on the budget planning of village funds. risk assessments have significant effect on the implementation of village budget funds.*

© 2021

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya*

---

## Corresponding Author:

Mutmainah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: mutmainah39@yahoo.co.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 pasal 5 yang menyatakan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Setelah melihat dan mengevaluasi tingkat perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa dari beberapa daerah otonom ternyata masih menunjukkan beberapa kegagalan dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, dalam arti bahwa banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)). Fenomena yang terjadi saat ini, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 252.192.374.800 untuk 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Sementara itu, pengelolaan anggaran desa masih menjadi kendala yang banyak dihadapi desa di Kotawaringin Timur. Bahkan tahun lalu ada desa yang hanya menggunakan anggaran untuk gaji, sedangkan untuk program pembangunan tidak ada sama sekali, padahal setiap desa mengelola anggaran rata-rata di atas Rp.1 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh H Supian Hadi sebagai Bupati Kotawaringin Timur, dalam arti bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum terlaksana secara optimal (Norjani, 2019: Antara Kalteng).

Pemerintah desa di Kecamatan Mentaya Hulu sebagai pihak yang diberi tugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pelaksanaan kewenangan desa tersebut sudah pasti memerlukan pengelolaan keuangan desa yang baik. yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah perencanaan. Perencanaan yang dimaksud disini meliputi proses perencanaan dan penganggaran.

## **2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Sistem Pengendalian Intern (Spip)**

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

### **Unsur-Unsur SPIP**

1. Lingkungan Pengendalian  
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian intern dan lingkungan kerjanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
2. Penilaian Resiko  
Menurut Suwanda dan Dailibas (2013) Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya suatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian resiko adalah salah satu unsur SPIP yang sangat penting. Ini merupakan rohnya SPIP.
3. Kegiatan Pengendalian  
Menurut Suwanda dan Dailibas (2013) Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan Komunikasi  
Menurut Suwanda dan Purwoko (2014) Definisi informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan unit kerja harus memastikan terjalannya komunikasi internal dan eksternal yang efektif.
5. Pemantauan  
Menurut Suwanda dan Dailibas (2013) Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

### **Tahapan SPIP**

Menurut Suwanda dan Dailibas (2013) Diperlukan dua tahapan besar dalam penerapan SPIP, yaitu tahap pembangunan dan tahap pengembangan. Tahap pembangunan adalah merupakan tahap pertama, sedangkan tahap pengembangan merupakan tahap lanjutan.

## **Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

### **Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah NO 60 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa dan Desa Adat yang di ditransfer malalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

### **Anggaran Dana Desa**

Anggaran Dana Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurangkurangnya sekali dalam setahun (V. Wiratna Sujarweni, 2015).

### **Perencanaan Anggaran Dana Desa**

Menurut BPKP, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

### **Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Menurut BPKP, Dalam pelaksanaan anggaran dana desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Lingkungan Pengendalian (X1) Terhadap Perencanaa (Y1) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2)**

Lingkungan pengendalian merupakan unsur utama SPIP dan merupakan pondasi dalam bentuk sistem pengendalian yang handal. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan dengan memperhatikan setiap unsur dalam pengendalian internal. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian intern dan lingkungan kerjanya.

H1a : Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa.

H2b : Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

### **Pengaruh Penilaian Risiko (X2) Terhadap Perencanaan (Y1) dan Pelaksanaan anggaran dana desa (Y2)**

Penilaian resiko merupakan mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, pemerintah desa wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan setiap unsur dalam pengendalian internal.

H3a : Penilaian Resiko berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa.

H4b : Penilaian Resiko berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

### **Pengaruh Kegiatan Pengendalian (X3) Terhadap Perencanaan (Y1) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2)**

Kegiatan pengendalian merupakan langkah dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. COSO (2013) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Kegiatan pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya kegiatan pengendalian yang mungkin relevan

dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemindahan tugas.

H5a : Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa.

H6b : Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

#### **Pengaruh Informasi dan Komunikasi (X4) terhadap Perencanaan (Y1) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2)**

Informasi dan komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan orang atau entitas untuk dapat memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan operasional.

H7a : Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa.

H8b : Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

#### **Pengaruh Pemantauan (X5) Terhadap Perencanaan (Y1) Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2)**

Sistem pengendalian intern perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

H9a : Pemantauan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa

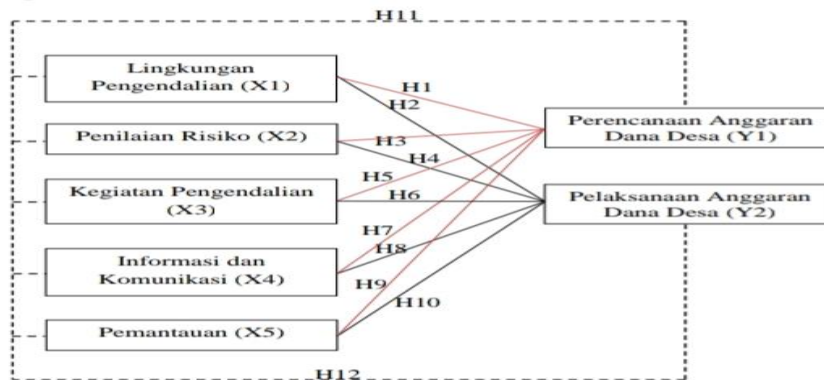
H10b : Pemantauan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa

#### **Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi Dan Pemantauan Terhadap Perencanaan (Y1) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2).**

Sistem pengendalian intern terdiri dari lima unsur komponen utama yang saling berkaitan. Komponen ini bersumber dari cara manajemen (pemimpin) menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses bisnis. COSO (2013) merumuskan lima komponen tersebut sebagai a) lingkungan pengendalian, b) penilaian resiko, c) kegiatan pengendalian, d) informasi dan komunikasi, dan e) pemantauan.

H11a : Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa.

H12b : Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara simultan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.



Gambar 1. Model Penelitian

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pupulasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari aparatur kecamatan, aparatur desa dan badan pengawas pengelolaan dana desa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006:123). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti

### Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, digunakan *Multiple Linear Regression* atau regresi linear berganda (Ghozali, 2011:33). Dalam penelitian ini, digunakan variabel dependen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa variabel independen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Model regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan:

$$PRN = \alpha + \beta_1LP + \beta_2PR + \beta_3KP + \beta_4IT + \beta_5P + e$$

$$PLK = \alpha + \beta_1LP + \beta_2PR + \beta_3KP + \beta_4IT + \beta_5P + e$$

$\alpha$  = Konstanta

LP = Lingkungan Pengendalian

PR = Penilaian Resiko

KP = Kegiatan Pengendalian

IT = Informasi dan Komunikasi

P = Pemantauan

PRN = Perencanaan

PLK = Pelaksanaan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3..$  = koefisien regresi masing-masing variabel independen

$e$  = koefisien *error* atau faktor pengganggu

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini akan dilakukan jika jumlah variabel independen minimal dua (Hartono, 2017:199). Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 4.9 untuk Y1:

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dengan Variabel Dependen Perencanaan Anggaran Dana Desa (Y1)

	<i>Unstandardized B</i>	Sig
Konstanta	2,237	0,004
Lingkungan Pengendalian (X1)	0,172	0,000
Penilaian Resiko (X2)	-0,168	0,000
Kegiatan Pengendalian (X3)	0,193	0,000
Informasi dan Komunikasi (X4)	-0,171	0,004
Pemantauan (X5)	-0,125	0,002

Sumber: Lampiran 6 Hasil Uji Signifikansi Nilai (t)

$$PRN = \alpha + \beta_1LP + \beta_2PR + \beta_3KP + \beta_4IK + \beta_5P + e$$

$$PRN = 2,236 + 0,172LP + -0,168PR + 0,193KP + -0,171IK + -0,125P + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda untuk variabel dependen perencanaan anggaran dana desa diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada persamaan Tabel 4.15 di atas nilai konstanta diperoleh sebesar 2,237 yang berarti jika variabel independen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan sebagai variabel independen sama dengan nol, maka nilai variabel dependen yaitu Perencanaan Anggaran Dana Desa adalah sebesar 2,237.
2. Koefisien regresi Lingkungan Pengendalian pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar 0,172. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan Lingkungan pengendalian maka akan meningkatkan perencanaan anggaran dana desa akan meningkat sebesar 0,172 atau 17,2% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Koefisien regresi penilaian resiko pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,168. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan penilaian resiko maka perencanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,168 atau -16,8% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi kegiatan pengendalian pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar 0,193. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan kegiatan pengendalian maka perencanaan anggaran dana desa akan meningkat sebesar 0,193 atau 19,3% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

5. Koefisien regresi informasi dan komunikasi pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,171, Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan informasi dan komunikasi maka perencanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,171 atau -17,1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
6. Koefisien regresi pemantauan pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,125. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan pemantauan maka perencanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,125 atau -12,5% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Dependen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Y2

	<i>Unstandardized B</i>	<i>Sig</i>
Konstanta	1,746	0,017
Lingkungan Pengendalian (X1)	0,175	0,000
Penilaian Resiko (X2)	-0,157	0,000
Kegiatan Pengendalian (X3)	0,201	0,000
Informasi dan Komunikasi (X4)	-0,184	0,001
Pemantauan (X5)	-0,121	0,001

Sumber: Lampiran 6 Hasil Uji Signifikansi Nilai (t)

$$PLK = \alpha + \beta_1LP + \beta_2PR + \beta_3KP + \beta_4IK + \beta_5P + e.$$

$$PLK = 1,746 + 0,175LP + -0,157PR + 0,201KP + -0,184IK + -0,121P + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda untuk variabel pelaksanaan anggaran dana desa diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada persamaan Tabel 4.16 di atas nilai konstanta diperoleh sebesar 1,746 yang berarti jika variabel independen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan sama dengan nol, maka nilai variabel dependen yaitu Pelaksanaan Anggaran Dana Desa adalah sebesar 1,746.
2. Koefisien regresi Lingkungan Pengendalian pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar 0,175. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan Lingkungan pengendalian maka perencanaan anggaran dana desa akan meningkat sebesar 0,175 atau 17,5% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Koefisien regresi penilaian resiko pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,157. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan penilaian resiko maka pelaksanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,157 atau -15,7% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi kegiatan pengendalian pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar 0,201. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan kegiatan pengendalian maka pelaksanaan anggaran dana desa akan meningkat sebesar 0,201 atau 20,1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
5. Koefisien regresi informasi dan komunikasi pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,184. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan informasi dan komunikasi maka pelaksanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,184 atau -18,4% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
6. Koefisien regresi pemantauan pada persamaan di atas diperoleh nilai sebesar -0,121. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya kenaikan satu satuan pemantauan maka pelaksanaan anggaran dana desa akan mengalami penurunan sebesar -0,121 atau -12,1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

### Hasil Uji Statistik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana Lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan berpengaruh terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Variabel Dependen Perencanaan Anggaran Dana Desa

Pengujian	Unstandardized B	Nilai $T_{hitung}$ dan $F_{hitung}$	Sig	Standar Aturan	Kesimpulan
(Constant)	2,237	2,892	0,004		

H1	Uji t	0,172	5,838	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H2	Uji t	-0,168	-4,199	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H3	Uji t	0,193	9,583	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H4	Uji t	-0,171	-2,932	0,004	< 0,05	Hipotesis Diterima
H5	Uji t	-0,125	-3,124	0,002	< 0,05	Hipotesis Diterima
H6	Uji F		80,627	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
Koefisien Determinasi		<i>Adjusted R Square 0,679 (67,9%)</i>				

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel Dependen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

	Pengujian	Unstandar dized B	Nilai T <sub>hitung</sub> dan F <sub>hitung</sub>	Sig	Standar Aturan	Kesimpulan
	(Constant)	1,746	2,419	0,017		
H1	Uji t	0,175	6,330	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H2	Uji t	-0,157	-4,216	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H3	Uji t	0,201	10,704	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H4	Uji t	-0,184	-3,383	0,001	< 0,05	Hipotesis Diterima
H5	Uji t	-0,121	-3,247	0,001	< 0,05	Hipotesis Diterima
H6	Uji F		98,403	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
Koefisien Determinasi		<i>Adjusted R Square 0,729 (72,9%)</i>				

Sumber: Sumber: Hasil Olah Data, 2021

**1) Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Melihat hasil dari T<sub>hitung</sub> dan signifikansi uji statistik t pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.18 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Secara Parsial Lingkungan Pengendalian Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.
  - a) Uji hipotesis secara parsial H1a adalah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.17, koefisien regresi variabel Lingkungan Pengendalian sebesar 5,838 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa sehingga H1a penelitian ini diterima.
  - b) Uji hipotesis secara parsial H1b adalah Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.18, koefisien regresi variabel Lingkungan Pengendalian sebesar 6,330 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sehingga H1b penelitian ini diterima.
2. Pengaruh Secara Parsial Penilaian Resiko Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.
  - a) Uji hipotesis secara parsial H2a adalah Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.17, koefisien regresi variabel Penilaian Resiko sebesar -4,199 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa sehingga H2a penelitian ini diterima.
  - b) Uji hipotesis secara parsial H2b adalah Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.18, koefisien regresi variabel Penilaian Resiko sebesar -4,216 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sehingga H2b penelitian ini diterima.
3. Pengaruh Secara Parsial Kegiatan Pengendalian Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.
  - a) Uji hipotesis secara parsial H3a adalah Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.17, koefisien regresi variabel Kegiatan Pengendalian

- sebesar 9,583 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa sehingga H3a penelitian ini diterima.
- b) Uji hipotesis secara parsial H3b adalah Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.18, koefisien regresi variabel Kegiatan Pengendalian sebesar 10,704 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sehingga H3b penelitian ini diterima.
4. Pengaruh Secara Parsial Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.
    - a) Uji hipotesis secara parsial H4a adalah Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.17, koefisien regresi variabel Informasi dan Komunikasi sebesar -2,932 dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,004 < 0,05$  yang berarti Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa sehingga H4a penelitian ini diterima.
    - b) Uji hipotesis secara parsial H4b adalah Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.18, koefisien regresi variabel Informasi dan Komunikasi sebesar -3,383 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,001 < 0,05$  yang berarti Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sehingga H4b penelitian ini diterima.
  5. Pengaruh secara parsial pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa.
    - a) Uji hipotesis secara parsial H5a adalah Pemantauan berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.17, koefisien regresi variabel Pemantauan sebesar -3,124 dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,004 < 0,05$  yang berarti Pemantauan berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa sehingga H5a penelitian ini diterima.
    - b) Uji hipotesis secara parsial H5b adalah Pemantauan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Berdasarkan Tabel 4.18, koefisien regresi variabel Pemantauan sebesar -3,247 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi = 5%; karena signifikansi  $0,001 < 0,05$  yang berarti Pemantauan berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sehingga H5b penelitian ini diterima.

### Hasil Uji F ( Uji Simultan)

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas (independen) dalam hal ini Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya (dependen).

1. Uji F (Uji Simultan) Variabel Dependen Perencanaan Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan pada data menunjukkan nilai F hitung sebesar 80,627 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa.

2. Uji F (Uji Simultan) Variabel Dependen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan pada data menunjukkan nilai F hitung sebesar 98,403 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Setelah variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa (Y1) dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (Y2), maka untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat pada data hasil perhitungan dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS), seperti terlihat di bawah ini.

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi Perencanaan Anggaran Dana Desa

Data menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,679 atau 67,9%. Ini berarti bahwa variabel independen berupa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Perencanaan Anggaran



Dana Desa sebesar 67,9% sedangkan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi penelitian ini.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

Data menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,729 atau 72,9%. Ini berarti bahwa variabel independen berupa Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa sebesar 72,9% sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi penelitian ini.

## **Pembahasan Hipotesis**

### **Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran dana desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Hal ini membuktikan bahwa unsur lingkungan pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang positif terhadap perencanaan anggaran dana desa. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dari setiap pimpinan satuan kerja perangkat desa membawa suasana yang nyaman bagi setiap penyelenggara pemerintah untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya sebagai aparatur desa sangatlah berperanan besar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan Rita Martini (2019) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Hal ini karena pemerintah desa telah mampu mewujudkan komitmen terhadap pelaksanaan anggaran dana desa, sehingga semakin tinggi penerapan lingkungan pengendalian oleh pimpinan dan aparatur desa maka semakin baik pelaksanaan anggaran dana desa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan Rita Martini (2019) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Penilaian Resiko Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel penilaian resiko berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan penilaian resiko memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan anggaran dana desa. Dengan kata lain apabila penilaian resiko telah dilakukan dengan baik maka akan menurunkan tingkat perencanaan anggaran dana desa. Hal ini berarti bahwa penilaian resiko sudah diterapkan dengan baik, namun masih belum mampu mendukung secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurang efektif dalam penyelenggaraan perencanaan anggaran dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa penilaian resiko berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dalam penelitiannya penilaian resiko dengan identifikasi resiko dan analisis resiko yang telah dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi.

### **Penilaian Resiko Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel penilaian resiko berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan penilaian resiko memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Hal ini berarti bahwa penilaian resiko sudah diterapkan dengan baik, namun dalam pelaksanaan anggaran dana desa masih belum efektif, maka dalam penerapannya masih kurang maksimal oleh pimpinan dan aparatur desa. Sehingga semakin baik penerapan penilaian resiko maka akan menurunkan kinerja dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa penilaian resiko berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dalam penelitiannya penilaian resiko dengan identifikasi resiko dan analisis resiko yang telah dilakukan, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi.

### **Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Hal ini berarti bahwa kegiatan pengendalian telah menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan aktivitas pengendalian dengan baik dalam perencanaan anggaran dana desa, sehingga dalam penerapannya semakin tinggi kegiatan pengendalian oleh pimpinan dan aparatur desa maka semakin baik perencanaan anggaran dana desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan Rita Martini (2019) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kegiatan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa telah berhasil menerapkan lingkungan pengendalian dengan baik, sehingga semakin tinggi penerapan kegiatan pengendalian oleh pimpinan dan aparatur desa maka semakin baik pelaksanaan anggaran dana desa.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan Rita Martini (2019) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **Informasi Dan Komunikasi Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan informasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan anggaran dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik informasi dan komunikasi yang terjalin dalam sebuah instansi maka dapat dipastikan akan menyebabkan penurunan dalam tingkat perencanaan anggaran dana desa, Sehingga tingkat perencanaan anggaran dana desa masih belum terencana dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dalam penelitiannya bahwa informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan.

#### **Informasi Dan Komunikasi Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan informasi dan komunikasi memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin baik informasi dan komunikasi yang terjalin dalam sebuah instansi maka akan menyebabkan penurunan dalam tingkat pelaksanaan anggaran dana desa, Sehingga tingkat pelaksanaan anggaran dana desa masih belum terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena dalam penelitiannya menyatakan bahwa informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. Namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan.

#### **Pemantauan Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan pemantauan memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan anggaran dana desa. Pengaruh negatif pemantauan terhadap perencanaan memiliki arti bahwa ketika pemantauan pengendalian intern yang terdapat pada suatu instansi berjalan dengan baik maka akan mengalami penurunan dalam perencanaan anggaran dana desa, sehingga dalam kegiatan monitoring dalam perencanaan anggaran dana desa masih belum terencana dengan dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindaklanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya.

#### **Pemantauan Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara signifikan pemantauan memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Pengaruh negatif pemantauan terhadap pelaksanaan memiliki arti bahwa ketika pemantauan pengendalian intern yang terdapat pada suatu instansi berjalan dengan baik maka dalam tingkat pelaksanaan anggaran dana desa mengalami penurunan, sehingga dalam dalam pelaksanaan anggaran dana desa belum dievaluasi dengan baik. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuning Hindriani (2012) menyatakan bahwa pemantauan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Namun tindak lanjut rekomendasi monitoring oleh APIP masih belum mendapatkan prioritas dalam penanganannya.

#### **Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Berpengaruh Terhadap Perencanaan Anggaran Dana Desa.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa. Artinya hipotesis kesebelas (H11) diterima dan dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap perencanaan anggaran dana desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa dapat diterima.

#### **Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dana Desa.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Artinya hipotesis kedua belas (H12) diterima dan dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap perencanaan anggaran dana desa dapat diterima.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa, karena pada instansi baik dari aparatur maupun pimpinan sudah mengetahui dan menjalankan mulai dari lingkungan pengendalian terkait pada struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
2. Penilaian resiko berpengaruh negatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa, karena penilaian resiko yang dilakukan oleh instansi pemerintah desa hanya berupa masih identifikasi resiko dan analisis resiko, namun belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi dengan baik.
3. Kegiatan pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa, karena pemerintah desa di Kecamatan Mentaya Hulu telah menerapkan Langkah-langkah aktivitas pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi dari unit kerja pemerintah desa. Pemerintah desa juga telah menetapkan sasaran perencanaan anggaran dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Informasi dan komunikasi juga memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa, pemerintah desa di Kecamatan Mentaya Hulu informasi dan komunikasi yang diselenggarakan hanya berupa informasi yang bersifat formalitas saja, sehingga Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Namun dengan demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan.
5. Pemantauan yang merupakan salah satu unsur SPIP yang menentukan kualitas kerja pengendalian intern sepanjang waktu memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa. Pemerintah desa telah menyelenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan. lingkungan instansi pemerintah desa terus berkomitmen tinggi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi mematuhi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan koridor sistem pengendalian intern.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini terbatas hanya pada 16 desa dan 1 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga belum mewakili kondisi sebenarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur dan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan jika dilakukan penambahan objek penelitian dan daerah

- penelitian yang berbeda. Kurangnya waktu yang dimiliki peneliti, menyebabkan peneliti tidak mampu mendapatkan responden di seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Penelitian ini tidak dapat mewakili kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah, karena kondisi setiap daerah atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki karakter dan SDM yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan jika dilakukan di daerah lain.
  3. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Kurangnya kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat menyebabkan penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. Keadaan ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan karena berada di luar kemampuan peneliti.

## REFERENCES

- Armando, Gerry. 2008. *Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang.
- Andriani, Nini 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Audit Internal sebagai Variabel Moderating pada Universitas Tadulako. *Tesis*
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Secara Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- COSO, 2013. Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary, Durham, North Carolina, May 2013.
- Dadang Suwanda, Dailibas, 2013. Panduan Penerapan: *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PPM Manajemen, Jakarta Pusat.
- Dadang Suwanda, Agus Purwoko, 2014. *Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PPM Manajemen, Jakarta Pusat.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. Bandung Business School: ISSN: 1693-4482.
- Indra Bastian. 2011. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Indonesia, R. 2007. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Kalteng.antaranews.com, (2019, 21 Februari). Pemkab Kotim Tingkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, Diakses pada 15 September 2019, dari <http://kalteng.antaranews.com/berita/303387/pemkab-kotim-tingkatkan-pembinaan-pengelolaan-keuangan-des>
- Moeller, Robert R., 2007. *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: ANDI.
- Nuning Hindriani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana – Vol. 15, No. 3*.
- Paneo, F., Sondakh, J., & Morasa, J. (2017). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, 213-222.
- Pertiwi, Dian. 2016. *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Alauddin Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Rita Martini, Naufal L, Sukmini H, Zulkifli Z, Endah W. 2019. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi 2019 Volume 2 No.1*|106
- Saleba, Siti Nurjanah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Sabeni, A dan Gozali I, 1995. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah*. Edisi 4, Yogyakarta : BPF
- Sari, Diana. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Proceedings ISSN-2252-3936.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : ALFABETA.

- Tahir, Muhammad. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nduga Provinsi Papua*. Jakarta: Unipersitas Terbuka.
- Undang-undang No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No. 5 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Undang-undang No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Pustaka Baru Press.